

FEMINISME DAN PERJUANGAN PEREMPUAN (Implementasi pada Kebijakan Negara)

Oleh Angelina Sondakh

Anggota DPR-RI Komisi X Fraksi Partai Demokrat

PENDAHULUAN

Perjuangan perempuan di Indonesia ternyata tidak sendiri yang mengalami diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Bidang -bidang penting yang masih jauh dari harapan perjuangan kaum perempuan itu bisa di saksikan dalam bidang pendidikan, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Diskriminasi pendidikan bisa kita temukan melalui angka putus sekolah dengan prosentase lebih tinggi, bila dibandingkan dengan angka putus sekolah yang terjadi pada kaum laki-laki. Sementara dalam bidang ekonomi, kaum perempuan tak dapat menikmati hasil pembangunan sebagaimana kaum laki-laki. Ibu - ibu atau perempuan lebih banyak berkuat dengan rutinitas mengasuh, mendidik dan membesarkan anak serta melayani suami di rumah. Inilah yang membuat perempuan tidak punya waktu berkreatifitas seperti kaum laki-laki.¹

Karena kesibukan itulah target quota 30% jatah politik perempuan dalam bidang politik pada pemilihan umum (pemilu) legislatif tahun 2004 tidak mencapai target. Dan itu bisa dibuktikan dengan angka keterwakilan perempuan di parlemen hanya 12% dari 550 kursi yang tersedia di DPR-RI. Atau hanya 22 kursi yang bisa di isi perempuan sekarang. Sebuah realitas yang sangat berat buat perjuangan perempuan memperbaiki keadaan bangsa melalui kekuatan yang dimilikinya. Jangankan memperbaiki bangsa, untuk memperjuangkan nasib dan harkat kaum sendiri saja terasa sulit.

Kenyataan sulit itu tidak boleh menyurutkan perjuangan perempuan dalam memperbaiki hak-hak asazinya yang hilang. Karena dalam konfrensi dunia tentang perempuan, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) telah mencanangkan '*Dekade Perempuan*' sejak tahun 1975-1985. Begitupun pada tahun 1981, keluar konvensi PBB tentang '*Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan*'. Jauh sebelum itu sudah ada deklarasi hak asazi manusia (HAM). Dan negara yang menandatangani kesepakatan DUHAM harus

¹ . Lihat Angelina Sondakh dalam makalah, Peran Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Nasional (Catatan Pendidikan Jarak Jauh Universitas Terbuka), 2006

menghormati dan menegakan nilai-nilai kemanusiaan tanpa membedakan ras, agama, budaya, usia, suku dan jenis kelamin. Karena itu sebagai salah satu negara penandatangan piagam PBB dan deklarasinya, Indonesia harus menghormati keputusan internasional itu secara konsekwen dan bertanggung jawab.

Pertemuan pertama Internasional yang membahas masalah perempuan dilangsungkan di negara Brazil pada tahun 1975-1985. Dan di Wina kaukus perempuan Internasional lebih keras dengan menolak perdagangan perempuan atau eksploitasi seperti dalam pelacuran. Sikap itu dituangkan dalam deklarasi '*Anti Kekerasan Perempuan*' pada desember tahun 1993. Fakta ini menunjukkan pada kita bahwa persoalan perempuan Indonesia juga dirasakan oleh kaum perempuan di negara lain. Atau perjuangan memperbaiki hak-hak perempuan sudah lama menjadi isu global.²

REALITAS DISKRIMINASI

Sebelum kita membahas persoalan diskriminasi yang di alami oleh perempuan di negara kita. Alangkah baiknya kita jelaskan pengertian feminisme. Partanto dan Dahlan Al-Bari dalam kamus ilmiah populer mengartikan feminisme sebagai emansipasi perempuan. Sementara feminisme dalam *Hermeneutika dan Perempuan* karya Suratno mengartikannya sebagai lawan dari budaya maskulinitas. Dimana budaya ini begitu kental dalam masyarakat Indonesia. Sebuah masyarakat yang cara berpikarnya sangat patriarki.

Ada beberapa alasan yang membuat budaya ini sangat kental di dalam masyarakat kita. (1). Budaya patriarki yang meletakkan kaum laki-laki sebagai kaum superior, sementara perempuan dipandang sebagai kaum inferior (2). Peniruan (*modeling*) akibat terbiasa menyaksikan pola komunikasi sosial *bias* gender, yang mengandung banyak bentuk kekerasan terhadap perempuan. (3) salah satu yang menyebabkan poin kedua ini yaitu pemahaman dan penafsiran yang keliru terhadap ajaran dan teks-teks agama itu sendiri. Hanya saja saya tidak kompeten membicarakan poin yang ketiga itu secara spesifik.

Kembali pada pokok masalah tentang diskriminasi yang dialami kaum perempuan. Perjuangan perempuan yang ingin hak-haknya diakui ternyata telah berlangsung cukup lama. Sejak 20 tahun lebih Indonesia sudah mengimplementasikan UU No. 7 Tahun 1984 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun implementasi dari ratifikasi konvensi CEDAW PBB itu tidak banyak menolong kaum perempuan terbebas dari masalah. Hal itu yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa

² Lihat Saparina Sadli, *Perempuan dan Hak Asazi Manusia*, 2006

perjuangan yang sudah sangat lama itu tak juga membuat kaum perempuan memperoleh hak-haknya. Bisa jadi hanya sedikit yang tahu tentang UU tersebut. Selebihnya mayoritas pengambil keputusan di negara ini tidak mengerti atau terbingong-bengong dalam mengimplementasikan UU paling fundamental bagi kaum perempuan tersebut.

BUDGET PEMERINTAH TIDAK PRO GENDER

Masih tentang diskriminasi pada kaum perempuan. Budget yang di anggarkan pemerintah belum berpihak pada kaum perempuan. Padahal salah satu yang paling penting juga untuk mendorong terjadinya kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari besaran alokasi anggaran yang dipersiapkan negara dalam membantu memecahkan persoalan kaum perempuan di Indonesia. Karena itu berikut kita lihat referensi yang dipakai negara lain dalam menyusun anggaran yang responsif terhadap gender seperti dibawah ini dalam 3 model yang dikembangkan oleh Rhonda, Debbie dan Kerri Allen sebagai berikut ;

KATEGORI ANGGARAN RESPONSIF GENDER EXCITING MODEL

Kategori 1 Alokasi anggaran gender Specific targeted belanja yang diperlukan bagi perempuan atau laki-laki dalam komunitas utk memenuhi kebutuhan khususnya contoh ; alokasi anggaran untuk kesehatan reproduksi perempuan, alokasi anggaran utk penyediaan alat kontrasepsi bagi laki-laki, alokasi anggaran utk penderita kanker postulat, alokasi anggaran untuk sunatan masal	Kategori 2 Alokasi anggaran untuk meningkatkan kesempatan setara setara dalam pekerjaan sebagai afirmatif action utk mewujudkan kesempatan yang setara antar laki-laki dan perempuan terutama dalam lingk. Pemerintahan atau dunia kerja lainnya contoh ; alokasi anggaran utk pelatihan pertanian bagi perempuan, alokasi anggaran untuk fasilitas penitipan di tempat kerja	Kategori 3 Alokasi angg. umum yang mainstreaming alokasi angg. umum yang menjamin agar pelayanan publik dapat diperoleh dan Di nikmati oleh semua anggota masyarakat (laki2 dan perempuan) contoh ; alokasi angg. utk penyediaan fasilitas WC umum yang proporsional terhadap jumlah pengguna (3 wanita, 2 laki-laki, alokasi anggaran utk penyediaan gerbong terpisah bagi laki-laki dan perempuan.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data budget pro gender yang menjadi acuan negara-negara yang ada itu ternyata belum berjalan dengan baik. Kondisinya justru bias dalam implementasinya. Budget responsif gender atau disingkat (ARG) malah dianggap sudah termasuk dalam pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Hal itu dapat dilihat dalam keputusan menteri dalam negeri No. 132 tahun 2003 pada pasal 7 ayat 1. Disitu disebutkan kalau budget ARG menyatu dalam program pemerintah yang bernama (PUG) Pengarus Utama Gender, yang didalamnya juga termasuk pengalokasian untuk program PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Hal itu yang mengakibatkan ketiadaan alokasi anggaran dalam penyediaan profil gender, pelatihan gender, ataupun evaluasi membuat ARG tidak berjalan karena tumpang tindihnya alokasi dana yang di siapkan pemerintah.

Sebagai contoh dana APBD propinsi tanah Toraja yang pada tahun 2005 mencapai Rp. 282.608.755.000 yang dimilikinya. Namun hanya 0,27% atau Rp. 779.904.000 yang responsif ARG. Alokasi dana itu jelas hanya mampu menutupi pemenuhan kebutuhan praksis gender. Sementara kebutuhan strategis gender tidak tercover sama sekali. Padahal 6,2% PAD (Pendapatan Asli Daerah)nya diperoleh dari kontribusi pendapatan pajak kaum perempuan. Sebuah angka yang semestinya dapat menutupi kebutuhan 4,3% ARG daerah itu.

Fakta ARG yang terjadi di tanah Toraja yang tidak pro gender itu juga ternyata banyak juga terjadi di daerah lain di Indonesia. Kota Mataram, Sukabumi, dan Tasikmalaya termasuk daerah yang pemerintahannya yang masih sangat diskriminatif dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan strategis kaum perempuan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menghapus persoalan itu harus bisa dipecahkan secepatnya diantaranya adalah sebagai berikut ;

1. Masih rendahnya kesadaran untuk mengimplementasikan ARG
2. Adanya kesalahpahaman yang masif tentang ARG
3. Model ataupun metode yang di sosialisasikan masih belum di kontekstualisasikan dengan sistem ataupun kondisi Indonesia
4. Kurangnya SDM untuk penerapan ARG baik dalam lembaga eksekutif, legislatif maupun masyarakat
5. Belum tersedianya indikator ARG

Catatan -catatan yang terpampang itu merupakan bukti otentik bahwa keberadaan kaum perempuan sangatlah berat bisa setara dalam banyak hal dengan kaum laki-laki. Dan salah satu yang bisa memecahkan beragam persoalan yang dihadapi kaum perempuan yaitu alokasi anggaran yang cukup untuk memecahkan hak-hak dasar yang menjadi kebutuhan

kaum perempuan bisa bangkit dari berbagai persoalan yang dihadapinya. Berikut beberapa yang menjadi data masalah perempuan di Indonesia seperti tersebut dibawah ini;

**PERIMBANGAN JUMLAH ANAK PUTUS SEKOLAH
TIAP 10 ANAK PUTUS SEKOLAH**

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1. SD	4	6
2. SMP	4	6
3. SMU	3	7

Sumber :

Depdiknas (diolah) dalam kompas, 13 Desember 2003

Sementara dalam masalah kesehatan tercatat angka kematian ibu dan balita juga tergolong tinggi. Dalam survey lembaga Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) ditemukan angka kematian ibu tercatat sebanyak 307/100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu itu termasuk yang paling tinggi di Asia Tenggara. Atau secara merata setiap jam terdapat dua ibu yang melahirkan meninggal dunia. Sedihnya lagi, survey juga menemukan sebanyak 50 % perempuan Indonesia mengalami penyakit anemia, dan 18%nya mengalami kekurangan energi protein. Selain ibu, badan pusat statistik tahun 2002 juga mencatat sebanyak 25,8% bayi yang lahir mengalami kekuarangan gizi. Dan jumlah ini diprediksi pada tahun-tahun yang akan datang akan semakin bertambah. Catatan itu terbukti dengan ditemukannya kasus busung lapar dan kekurangan gizi di pertengahan tahun 2005 hingga sekarang ini.

Persoalan yang sama tentang masalah perempuan juga dapat ditemui pada bidang ekonomi. Data survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menemukan ketimpangan upah perempuan dari upah yang diberikan perusahaan pada laki-laki. Ditemukan sebesar 60% penggajian yang diterima pekerja perempuan merupakan angka paling kecil dibanding laki-laki. Hal yang sangat menyedihkan yang dirasakan perempuan kita. Karena pekerja perempuan selain mencari nafkah, ternyata juga seorang ibu yang harus melayani pekerjaan rumah tangga. Dan semakin komplit derita yang ditanggung perempuan dengan maraknya perdagangan perempuan dan anak yang terjadi di dalam negeri maupun diluar negeri. Dalam berbagai pemberitaan media massa dan cetak, penjualan dan eksploitasi kaum perempuan ini melibatkan jejaring rapi secara nasional dan internasional.

STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Dari laporan UNDP tentang pembangunan *Gender Development Indeks* (GDI) diperoleh juga beberapa daerah yang punya catatan baik tentang pemberdayaan gender. Sesuatu yang patut di ikuti oleh daerah - daerah lain yang masih buruk perhatiannya terhadap masalah pemberdayaan perempuan di setiap daerah. Daerah yang dicatat bagus *Gender Empowerment Measure* (GEM) oleh UNDP diantaranya adalah kota Salatiga 72,5, Ambon 71,3, Pematang Siantar 70,4, Denpasar 70,4 dan kota Banda Aceh 70,1. Data postif yang sudah dilakukan oleh beberapa daerah itu, sangat mungkin mewujudkan pembangunan yang pro pada pengentasan rakyat miskin di setiap daerah. Karena itu hal-hal yang menghambat jalannya pemerintah dalam mengelola keuangan berupa prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas harus di dorong secara bersama-sama.

Kesepakatan internasional yang berbentuk *Milennium Development Goal's* (MDG's) dalam menciptakan pembangunan jangka panjang yang terintegrasi dalam memecahkan kemiskinan dan ketimpangan antara kaum miskin dan kaya di muka bumi harus berjalan sebagai komitmen pembangunan jangka panjang. Komitmen itu sekaligus sebagai sarana dalam menghapus persoalan diskriminasi yang dialami kaum perempuan di seantero dunia. Atau program yang mempromosikan kesetaraan gender melalui kebijakan anggaran yang responsif gender atau *pro-poor*. Hal itu diyakini dapat menghapus beragam persoalan, mulai dari kemiskinan, kekerasan maupun diskriminasi gender dan kelaparan yang terjadi di berbagai negara.

Karena itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam rangka membantu pemerintah memecahkan persoalan diatas. Salah satu yang bisa dilakukan yaitu menjalankan dokumen kebijakan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) dengan pemenuhan 10 hak dasar rakyat miskin diantaranya :

1. Pangan,
2. Layanan Kesehatan,
3. Pendidikan,
4. Pekerjaan dan Usaha,
5. Perumahan,
6. Air Bersih,
7. Tanah,
8. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
9. Rasa Aman, dan terakhir
10. Partisipasi.

Hak-hak dasar dasar itu dalam realitas sehari-hari masih merupakan kebutuhan langka yang belum bisa di nikmati atau dirasakan oleh mereka yang tergolong miskin. Karenanya bicara pemberantasan buta huruf, kemiskinan, diskriminasi gender dan pemerataan pembangunan saadil-adilnya oleh pemerintah harus berangkat dari pemenuhan kebutuhan diatas. Karena bagi sebagian yang paling merasakan penderitaan dari kemiskinan dan persolan lain adalah kaum perempuan. Maklum mayoritas jumlah dari penghuni di negeri ini adalah kaum perempuan. Jadi wajar bila perempuan yang juga warga negara Indonesia menuntut hak-haknya dalam berbagai lapangan baik sosial, agama, politik, ekonomi dan budaya untuk diberikan tempat yang sama.

PENUTUP

Kenyataan berat yang dirasakan perempuan sejak puluhan tahun berhadapan dengan negara tidak boleh menyurutkan perjuangan kaum perempuan untuk terus berjuang. Diskriminasi harus diselesaikan dengan metode-metode persuasif. Pendidikan, advokasi dan kampanye lewat media secara luas harus bisa menyentuh saudara kita kaum perempuan yang lain bisa bangkit. Kita tahu betul bahwa perempuan adalah makhluk yang memiliki masalah yang berlapis-lapis. Mereka ini rentan kekerasan. Kemiskinan keluarga dan orang tua kerap menjadikan anak perempuan gampang masuk dalam perangkap eksploitasi dan kekerasan. Mereka memilih jalur hidup hitam demi membantu ekonomi keluarga. Sebaliknya pula orang tua juga terpaksa menjual anak-anaknya secara sengaja demi kebutuhan hidup keluarga.³

Mata rantai kemiskinan, kekerasan maupun diskriminasi sudah menjadi paket-paket persoalan di negara berkembang seperti Indonesia. Skenario liberalisme dengan resep utama deregulasi dan privatisasi ekonomi yang masuk jangan sampai membuat negara ini melepas tanggung-jawabnya dalam menyiasati persoalan diskriminasi, kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan di negara kita. Dan tugas utama elemen-elemen kritis yang pro pada kesetaraan perempuan harus terus dibumikan di negara ini secara terus-menerus.

³ Lihat Jurnal Perempuan, untuk pencerahan dan kesetaraan, Sudahkah Anggaran Kita Sensitif Gender?